

Radio di Kawasan Perbatasan Indonesia dalam *Centering the Margin*

Iwan Awaluddin Yusuf

Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang Km 14,4, Yogyakarta 55584

Email: iwan.awaluddin@uii.ac.id

Abstract: *Most of Indonesian's border areas suffer from blank spot service, which prevent the citizen to receive information from the capital. The main function of the media in border areas is to articulate regional interests to be heard by the Government, so it will contribute to the dynamics of Indonesia's in terms of social, political, economic, and cultural. This paper explores the role of radio in contributing to "centering the margin": bring the regional aspirations to the central. Public policy and stakeholder collaboration that facilitated by media is one of the efforts to implement the egalitarian development in the border area.*

Keywords: *border areas, border radio, community radio, information gap, RRI*

Abstrak: *Kawasan perbatasan Indonesia banyak mengalami blank spot layanan informasi sehingga siaran yang menghubungkan warganegara dan pemerintah tidak tersampaikan dengan baik. Padahal, keberadaan media di perbatasan sangat strategis sebagai penyedia informasi yang merefleksikan dinamika lokal, mengartikulasikan kepentingan daerah sehingga dapat didengar oleh pusat. Harapannya, artikulasi tersebut dapat memberi warna pada dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya di tanah air. Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana radio di wilayah perbatasan memberikan kontribusi dalam peran centering the margin, yakni membawa aspirasi di perbatasan guna "memusatkan yang pinggir". Kebijakan publik dan kerja sama stakeholder yang difasilitasi media merupakan upaya untuk melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang egaliter.*

Kata Kunci: *kawasan perbatasan, kesenjangan informasi, radio di perbatasan, radio komunitas, RRI*

"Garuda di dadaku, Malaysia di perutku".
"Indonesia negaraku, Ringgit mata uangku".
"Indonesia ibu kandungku, Malaysia energiku". "Di Indonesia aku sehat, di Malaysia aku sakit". Demikian beberapa ungkapan khas yang populer di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia khususnya di daerah Kalimantan Barat. Ungkapan tersebut bukan sekadar sindiran sinis tentang Indonesia, melainkan potret ketimpangan yang dirasakan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya.

Ketimpangan akses informasi di perbatasan terlihat dari keberadaan media di wilayah Kalimantan Barat dengan Malaysia. Di Entikong misalnya, hanya tersedia dua radio siaran dan dua televisi Indonesia, sementara dari Malaysia 34 radio siaran dan 11 televisi. Di Sanggau Ledo, Kabupaten Ngabang terdapat tiga radio siaran dan satu televisi, sedangkan Malaysia 18 radio siaran dan lima televisi. Di Sajingan, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terdapat dua radio siaran dan satu

televisi Indonesia, sedangkan Malaysia 18 radio siaran dan empat televisi.

Di Entikong dan sekitarnya, radio atau televisi Malaysia rata-rata berkekuatan pemancar 20 kilowatt. Kondisi ini kontras dengan kekuatan pancar RRI sebagai satu-satunya radio publik di sana yang hanya berkekuatan 700 watt sampai tiga setengah kilowatt dari total maksimum daya pancar studio yang mencapai lima kilowatt. Lemahnya penerimaan siaran RRI memunculkan *plesetan* yang disampaikan oleh masyarakat setempat tentang slogan RRI yang seharusnya “*Sekali di Udara, Tetap di Udara*”, menjadi RRI Entikong “*Sekali Mengudara dan Sese kali Hilang dari Udara*”. Pengurangan lima kilowatt menjadi tiga setengah kilowatt oleh pengelola RRI didasari alasan penghematan listrik yang ketersediaannya sangat terbatas.

Akses masyarakat terhadap media selain radio dan televisi menunjukkan kondisi serupa bahkan lebih memprihatinkan. Di Entikong misalnya, jika masyarakat ingin membeli surat kabar dengan cara berlangganan, maka koran yang terbit hari ini, baru akan sampai di tangan pembacanya seminggu kemudian. Itupun dengan harga yang fantastis karena perhitungan tambahan untuk biaya pengiriman.

Di dalam lanskap akses informasi yang sedemikian timpang, tuntutan atau sekadar pertanyaan mengenai komitmen keIndonesiaan seringkali ditujukan secara sepihak kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan. Masyarakat Indonesia yang secara geografis tinggal di perbatasan

seolah dibebani tugas lebih berat untuk mengawal nasionalisme sekaligus menjaga identitas kebangsaan. Di sisi lain, isi media didominasi isu-isu dari ibukota sebagai pusat pemerintahan sehingga gambaran Indonesia sebagai negara yang terbentang luas dengan segala dinamikanya hanya dicerminkan oleh Jakarta dan kota-kota besar. Daerah-daerah perbatasan yang jauh dari ibukota negara dengan segala potensinya akhirnya tidak tampil dan terus berkuat dengan kesenjangan dan cerita ketertinggalan.

Potensi dan Persoalan di Wilayah Perbatasan

Berdasarkan konsepsi umum, kawasan perbatasan dimaknai sebagai wilayah yang berada paling ujung Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan (*archipelago*) yang dikelilingi lautan. Disebut kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar dari timur ke barat serta utara ke selatan. Selain “bertetangga” dengan lautan di sekelilingnya, Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara dan menjadi tetangga dekat.

Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara batas di laut dengan sepuluh negara, yaitu India, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina, Timor Leste, Palau, Australia, dan Papua Nugini. Termasuk di dalam konteks batas kelautan ini adalah pulau-pulau kecil terluar/terdepan, dikenal dengan istilah

Kawasan Perbatasan Laut, yakni suatu kawasan yang cakupannya mulai dari garis pangkal Kepulauan Indonesia hingga ke garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara geopolitik, Indonesia juga memiliki 92 pulau kecil terluar yang tersebar di 20 provinsi, dengan 31 pulau di antaranya berpenduduk (Mengibarkan Merah Putih, 2014, h. 90-91; Masduki & Yusuf, 2011, h. 11-12).

Sebagai daerah transit dan tempat keluar masuknya manusia dan barang antar negara, wilayah perbatasan merupakan titik strategis dan potensial, baik dalam konteks positif (menguntungkan) maupun negatif (merugikan). Potensi wilayah perbatasan antara lain (Masduki & Yusuf, 2011):

1. Merupakan etalase (*show window*) bagi kemajuan pembangunan bangsa.
2. Menjadi penjaga batas teritorial sehingga memiliki arti penting bagi penguatan aspek pertahanan dan keamanan.
3. Potensi pengembangan kawasan perbatasan darat
 - a. Kawasan hutan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi hutan produksi dengan produk-produk kayu/perkayuan atau produk-produk kehutanan (madu, getah damar, rotan, tanaman berkhasiat, dan lain-lain).
 - b. Kandungan mineral memiliki potensi pertambangan yang besar seperti batu bara, bijih besi, mangaan, dan sebagainya.

- c. Pelayanan jasa berupa *integrated growth centres* seperti *seaport, airport and inland port, industrial estate, housing complex, urban services*, dan lain-lain.
 - d. Perkebunan menghasilkan karet, kelapa sawit, pohon kayu, dan lain-lain.
 - e. Peternakan berpotensi untuk peternakan unggas dan ruminansia (ternak besar).
4. Potensi pengembangan kawasan perbatasan laut
 - a. Pariwisata.
 - b. Budidaya laut.
 - c. Riset, pengembangan, dan penerapan teknologi kelautan.
 - d. Usaha perikanan, kelautan, dan industri perikanan secara lestari.
 - e. Pertanian organik.
 - f. Peternakan.

Di luar potensi yang dimiliki, menurut Masduki & Yusuf (2011), kawasan perbatasan juga merupakan sumber banyak permasalahan, yakni:

- 1) Permasalahan umum
 - a. Langkanya prasarana dasar yang dibutuhkan untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di kawasan perbatasan. Kelangkaan prasarana dasar ini termasuk kurangnya prasarana perhubungan seperti jalan, jembatan, dermaga, jaringan listrik, telekomunikasi, prasana pendidikan/sekolah, dan prasarana kesehatan.

- b. Tidak tersedianya rencana detil dan padu mengenai tata ruang kawasan perbatasan yang merupakan penjabaran dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan. Akibatnya, tidak diketahui secara pasti pembagian zonasi ruang, arah pemanfaatan ruang, serta struktur pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.
- c. Pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar masih bersifat parsial.
- d. Langkanya investasi/penanaman modal yang masuk ke kawasan perbatasan untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang melimpah.
- e. Langkanya sumberdaya manusia yang berkualitas (terdidik dan terlatih) untuk membangun dan mengembangkan potensi kawasan perbatasan.
- f. Tingginya angka kemiskinan dan rendahnya angka indikator indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan.
- c. Penyelundupan komoditas secara ilegal.
- d. Kesenjangan ekonomi masyarakat perbatasan. Pendapatan per kapita masyarakat perbatasan di provinsi Kalimantan Barat hanya berkisar USD 1.000 per tahun, sedangkan pada masyarakat perbatasan di Malaysia berkisar hingga USD 11.000 per tahun.
- e. Keterbatasan infrastruktur berupa prasarana transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan. Akibatnya, kawasan perbatasan sering diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggal.

Tanpa bermaksud mengabaikan pentingnya pengembangan pada aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik, hukum, dan pertahanan-keamanan, ketersediaan media dan kemudahan akses informasi tentang Indonesia di wilayah perbatasan merupakan aspek penting yang perlu diprioritaskan. Fungsi utama dari media di perbatasan adalah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan daerah sehingga dapat didengarkan oleh pemerintah pusat yang akhirnya memberi warna pada dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya di tanah air. Inilah inti dari proses *centering the margin*, yaitu memusatkan yang terpinggirkan. Selama ini wilayah perbatasan seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini bisa dilihat dari minimnya pembangunan di wilayah perbatasan. Barangkali hanya pembangunan wilayah perbatasan di Batam yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah

2) Permasalahan khusus

- a. Eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan di kawasan perbatasan berupa aktivitas *illegal logging* dan penambangan liar sehingga terjadi degradasi fungsi hutan dan lahan.
- b. Penyelundupan dan perdagangan manusia dari orang dewasa maupun anak-anak (*human/women trafficking*).

lain di luar wilayah perbatasan. Namun, hal itu terjadi karena perlakuan khusus yang diberikan pemerintah terhadap wilayah Batam (Puslitbangdiklat RRI, 2014, h. 343).

Berkenaan dengan pengelolaan wilayah perbatasan, secara umum dapat digunakan dua pendekatan utama yakni pendekatan kedaulatan (*sovereignty approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Jika pendekatan ini diturunkan pada tataran akses informasi, maka ketersediaan media dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan kedaulatan. Keberadaan media di wilayah perbatasan memiliki peran strategis bagi penguatan identitas keIndonesiaan karena beberapa alasan: 1) Media dapat mengimbangi penetrasi siaran asing dari negara tetangga, mampu mengurangi ketimpangan arus informasi di wilayah perbatasan; 2) Media bisa menjadi solusi atas keterbatasan akses informasi tentang Indonesia, agar rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa bela negara pada diri warga perbatasan dapat ditingkatkan; 3) *Information safety belt*, sebagai sabuk pengaman informasi dasar kenegaraan dan kepublikan bagi warga perbatasan/*blank spot*; 4) *Media-based cross border diplomacy*, media adalah alat diplomasi sosial yang efektif di perbatasan antar negara; 5) *Soft defend mechanism*, sebagai model penyeimbang pertahanan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat di bidang informasi.

Kedua, pendekatan kesejahteraan. Ini menyangkut kebutuhan nyata masyarakat

terhadap media yang didasari pada alasan-alasan tertentu yakni: 1) keberadaan media dapat membantu mengatasi ketidakberdayaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, dan hiburan, 2) menghubungkan antara warga di daerah perbatasan dengan pemerintah, dan 3) *early warning system*, yaitu menjadi media pemberi peringatan dini kepada warga perbatasan terkait bencana alam, situasi darurat, dan lain-lain.

HASIL

Optimalisasi Radio Republik Indonesia di Perbatasan

Temuan penelitian Puslitbangdiklat RRI (2014, h. 27-28) yang melakukan survei pada 499 responden di lima wilayah perbatasan, yakni Atambua (perbatasan dengan Timor Leste), Entikong (perbatasan dengan Malaysia), Nunukan (perbatasan dengan Malaysia), Boven Digoel (perbatasan dengan Papua Nugini), dan Batam (perbatasan dengan Singapura) tentang penggunaan media di wilayah perbatasan menunjukkan media yang paling sering diakses adalah radio (82,36%) dan televisi (81,36%). Media radio masih lebih unggul dibandingkan televisi yang persentasenya hanya selisih satu persen. Selain radio dan televisi, beberapa media lain yang diakses responden adalah media *online* (24,45%), surat kabar (23,45%), majalah (6,21%), dan *tabloid* (2%). Temuan yang menarik adalah akses terhadap media *online* yang lebih unggul dari surat kabar meskipun selisih persentasenya kecil. Surat kabar yang bertahun-tahun identik dengan

sumber informasi kini perlahan tersubstitusi oleh kehadiran media *online*. Pergeseran ini salah satunya disebabkan oleh kecepatan dan kemudahan akses yang dibawa oleh medium internet melalui *handphone* dibandingkan peredaran media cetak yang masih tergantung pada infrastruktur atau sarana transportasi. Padahal fenomena umum di Indonesia menggambarkan kondisi infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan masih jauh dari memadai.

Konsep transportasi sendiri didasarkan adanya perjalanan (*trip*) antara asal (*origin*) dan tujuan (*destination*). Alat transportasi dipilih dan digunakan masyarakat tergantung kepemilikan, daya beli, dan ketersediaan alat transportasi tersebut. Di daerah perbatasan, masyarakat sering mengalami kesulitan transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Di dalam transportasi, terdapat unsur-unsur yang terkait erat dalam berjalannya konsep transportasi itu sendiri. Unsur-unsur tersebut adalah manusia atau barang yang membutuhkan pengangkutan, kendaraan sebagai alat/sarana, jalan, dan terminal sebagai prasarana transportasi, serta organisasi pengelola transportasi.

Aspek penting dari sistem transportasi di daerah perbatasan selain kendaraan adalah infrastruktur jalan. Sebagian daerah belum memiliki jalan penghubung yang memadai. Sebagian lagi sudah tersedia, namun secara keseluruhan belum dapat menghubungkan antar kabupaten maupun antar kecamatan di wilayah perbatasan. Beberapa kecamatan di wilayah perbatasan bahkan relatif terisolasi karena tidak ada jalan penghubung. Sementara itu perhubungan

udara sebagai satu-satunya alternatif untuk membuka isolasi wilayah perbatasan masih dalam kapasitas yang sangat terbatas dan mahal. Sarana transportasi sungai yang biasa digunakan masyarakat pedalaman di perbatasan memerlukan waktu yang lama dengan biaya transportasi mahal dan tidak semua kecamatan di perbatasan dapat dihubungkan melalui sungai. Inilah yang menjadi kendala utama dalam mobilisasi barang maupun orang sehingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat menjadi terbatas dengan harga yang cukup mahal dibandingkan dengan harga barang di ibukota kabupaten. Jika kebutuhan pokok yang rutin dikonsumsi harganya tinggi, bisa dibandingkan dengan harga-harga komoditas lain seperti surat kabar atau majalah yang menjadi barang mewah di perbatasan.

Sebagai upaya membangun entitas negara bangsa, RRI sebagai lembaga penyiaran publik memegang peran yang sangat penting. Ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, dalam sejarahnya, RRI merupakan instrumen perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui beragam siarannya. *Kedua*, status RRI sebagai *Lembaga Penyiaran Publik* (LPP). Salah satu peran sebagai lembaga penyiaran publik adalah turut serta menjaga identitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi RRI untuk terus mengembangkan program-program yang menjaga identitas nasional Indonesia terlebih di daerah perbatasan. Benturan-benturan ‘budaya’ biasanya semakin kuat di daerah perbatasan sehingga

sangat mungkin terjadi adanya erosi atas identitas Indonesia. Di sinilah, peran RRI sebagai LPP menjadi semakin penting.

Merespon kebutuhan ini, RRI mendirikan stasiun perbatasan dan studio produksi siaran. Stasiun di perbatasan maupun studio produksi RRI secara langsung maupun tak langsung diharapkan dapat mengimbangi penetrasi siaran asing dari negara tetangga sekaligus mengurangi ketimpangan arus informasi di wilayah perbatasan. Sampai tahun 2014, RRI memiliki kurang lebih 20 stasiun di perbatasan dan studio produksi yang telah beroperasi di kawasan perbatasan Indonesia. Fasilitas stasiun RRI di kawasan perbatasan tergolong tipe C, yang tentu lebih memadai dibanding studio produksi RRI.

Meskipun potensi yang dimiliki RRI sedemikian besar, kinerja RRI saat ini belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal. Direktorat Program dan Produksi Siaran (DIR PP) LPP RRI pernah melakukan kajian terhadap RRI di daerah

perbatasan dengan memfokuskan pada program siaran (Darmanto dkk, 2012). Beberapa temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sisi program dan program, perencanaan program dan program sepenuhnya dilakukan oleh RRI dengan keterlibatan publik masih sangat minim. Akibatnya, nama-nama program siaran lebih mencerminkan citra rasa RRI tempo dulu. Program siaran yang bersifat lokal juga masih terbatas. Program siaran lokal masih banyak yang berformat *hardnews*, sedangkan program siaran lain bersifat *feature*, dokumen, dan bahkan siaran pendidikan masih sangat minim.

Pada penelitian lain yang dilakukan Puslitbangdiklat LPP RRI (2014, h. 120-121) yang menggali persepsi masyarakat atas kehadiran RRI di wilayah perbatasan, tercatat bahwa kehadiran RRI dimaknai masyarakat dengan beragam makna. Makna tersebut muncul dari harapan-harapan dan kenyataan atas kontribusi RRI dalam menjawab

Tabel 1 Stasiun RRI di Kawasan Perbatasan

Stasiun RRI	Provinsi	Status Stasiun
RRI Entikong	Kalimantan Barat	Stasiun RRI tipe C
RRI Boven Digul	Papua	Stasiun RRI tipe C
RRI Batam	Kepulauan Riau	Stasiun RRI tipe C
RRI Atambua	Nusa Tenggara Timur	Stasiun RRI tipe C
RRI Nunukan	Kalimantan Timur	Stasiun RRI tipe C
RRI Sampang, Madura	Jawa Timur	Studio Produksi
RRI Takengon, Aceh Tengah	Nanggroe Aceh Darussalam	Studio Produksi
RRI Malinau	Kalimantan Timur	Studio Produksi
RRI Sabang	Nanggroe Aceh Darussalam	Studio Produksi
RRI Padang Pariaman	Sumatera Barat	Studio Produksi
RRI Kaimana	Papua Barat	Studio Produksi
RRI Oksibil	Papua	Studio Produksi
RRI Skow	Papua	Studio Produksi
RRI Ampang, Tojo Una Una	Sulawesi Tengah	Studio Produksi
RRI Kutai Barat	Kalimantan Timur	Studio Produksi
RRI Sungai Peni	Jambi	Studio Produksi

kebutuhan mereka. Namun demikian, latar belakang informan memengaruhi cara pandang terhadap kehadiran RRI. Latar belakang ini setidaknya terlihat dari dua kategori, yakni pandangan masyarakat umum dan masyarakat yang berposisi sebagai aparat pemerintahan. Meskipun sama-sama menekankan arti penting RRI sebagai sumber informasi, argumentasi yang diberikan oleh masyarakat awam dan aparat di perbatasan menunjukkan titik pandang yang berbeda. Masyarakat awam dan tokoh masyarakat melihat kehadiran RRI dari sudut pandang pemenuhan kebutuhan praktis mereka sehari-hari berkaitan dengan informasi dan media untuk menyuarakan aspirasi. Sedangkan aparat pemerintahan melihat RRI sebagai sumber utama informasi sekaligus berkaitan dengan fungsi RRI yang dapat membantu pekerjaan mereka, misalnya sebagai sarana sosialisasi program dan medium interaksi dengan publiknya. Lebih lanjut RRI dianggap oleh aparat sebagai sarana ideal untuk memperkuat pemahaman dan penanaman nilai-nilai nasionalisme dalam lingkup pertahanan dan keamanan. Nasionalisme dan keIndonesiaan kadang bersumber dari beragam dimensi. Pada praktik di kawasan perbatasan, tumbuhnya nasionalisme dan keIndonesiaan justru bukan dari sesuatu yang kompleks, namun dari hal sederhana seperti lagu-lagu kebangsaan yang diputar di RRI dimaknai informan sebagai bentuk peneguh rasa keIndonesiaan di wilayah perbatasan.

Sebagai catatan penelitian, banyak program RRI yang menampilkan pemberitaan dan laporan terkait kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun

daerah. Kondisi ini merupakan sinyalemen positif karena RRI dapat menjadi media penghubung antara publik dengan pemerintah. Namun demikian, dengan status RRI sebagai lembaga penyiaran publik, RRI harus lebih berhati-hati dalam menjaga independensi dan keberpihakan sehingga tidak hanya menjadi kepanjangan tangan atau corong pemerintah. Sebaliknya, RRI dituntut berperan sebagai lembaga penyiaran publik independen yang menjadi saluran aspirasi publik sehingga merupakan keniscayaan untuk tetap menjaga keberpihakannya terhadap publik.

Selain daya jangkau, persoalan utama yang dihadapi pengelola RRI perbatasan dalam mengakses masyarakat terhadap siaran RRI seringkali justru berasal dari ketersediaan pesawat radio transistor. Jumlah pesawat radio di beberapa kawasan perbatasan sangat kurang dibanding jumlah penduduk, serta sulitnya memperoleh pesawat radio di toko-toko, dinilai menghambat akses masyarakat untuk mendengarkan radio.

Persoalan lain yang bersifat khusus juga terjadi di wilayah tertentu. Proses penyampaian aspirasi masyarakat misalnya seringkali terkendala hal-hal teknis. Masyarakat pelosok yang ingin terlibat aktif melalui telepon terkendala sinyal telepon seluler yang lemah atau bahkan tidak ada sinyal di pelosok perbatasan. Lebih parah lagi, keluhan yang dirasakan masyarakat Atambua misalnya, saat berinteraksi melalui telepon seluler adalah persoalan beban *roaming internasional*. *Roaming* yang dimaksud adalah biaya telepon

lokal yang terhitung internasional karena panggilan telepon lokal ditangkap oleh menara operator telepon dari Timor Leste sehingga komunikasi dengan *handphone* menjadi sangat mahal.

Di sisi lain, reporter yang melaporkan dari perbatasan juga seringkali terkena “ranjau” *roaming* yang akhirnya mengakibatkan proses pelaporan berita terganggu. Kenyataan ini memerlukan kebijakan telekomunikasi yang melibatkan otoritas antar negara. Jika tidak, masyarakat Indonesia di perbatasan Timor Leste akan terus mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Mereka memberi contoh jika menelpon dengan telepon seluler, baru menyapa “halo”, atau “selamat pagi”, sudah puluhan ribu pulsa yang tersedot karena terkena *roaming* internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan dari penggiat penyiaran amatlah penting. Bentuk-bentuk dukungan yang dapat diberikan oleh RRI dalam proses pembangunan kawasan perbatasan antara lain melalui pemanfaatan sarana dan prasarana siaran RRI di daerah perbatasan sekaligus peliputan dan penyiaran program kegiatan dengan isi materi berupa siaran pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

Di dalam kaitan inilah RRI perlu mengubah paradigma dan memperkuat infrastruktur siaran termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Sebagai lembaga penyiaran publik, semestinya RRI lebih melihat masyarakat lokal sebagai ‘subjek-subjek’ yang berbicara, tugas RRI kaitannya dengan ini adalah merepresentasikan

subjek-subjek itu. Penting pula bagi RRI untuk memikirkan upaya mendapatkan sumber daya manusia memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan radio siaran. Kurangnya insentif bagi pekerja RRI di perbatasan membuat tenaga-tenaga profesional yang relatif bagus tidak bersedia bertugas di perbatasan.

PEMBAHASAN

Radio Komunitas, Alternatif Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan

Media komunitas adalah media yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas sehingga sering disebut sebagai media sosial, media pendidikan, atau media alternatif. Media komunitas dapat dijadikan sebagai wahana komunikasi milik masyarakat yang potensial untuk melayani kepentingan komunitasnya sendiri. Media komunitas juga memiliki potensi kontribusi yang signifikan bagi demokrasi. Studi Prakoso dan Nugent, sebagaimana dikutip Rianto (2012, h. 92), mengemukakan bahwa kehadiran radio komunitas memberikan sumbangan pada demokratisasi di tingkat pedesaan, di mana sejumlah peran demokratis dibawa oleh lembaga penyiaran komunitas. Peran tersebut berupa memberikan kesempatan masyarakat untuk mengontrol pemerintah setempat, memaksa adanya transparansi, pertanggungjawaban dari pemerintah kepada masyarakat, serta mengontrol pemilihan kepala desa secara terbuka. Peran-peran seperti ini juga dapat dilakukan di kawasan perbatasan.

Sayangnya, dukungan pemerintah di wilayah perbatasan terhadap radio komunitas seringkali setengah hati. Oleh pemerintah daerah perbatasan, radio komunitas tak jarang dicap sebagai radio yang didanai “pihak-pihak tertentu” dengan kepentingan membahayakan “NKRI”. Di sisi lain, karena kekritisannya menyampaikan informasi alternatif, keberadaan radio komunitas sering dianggap semacam ancaman bagi pembentukan opini publik yang keliru tentang pemerintah di perbatasan.

Radio komunitas di perbatasan pada dasarnya memainkan peran yang hampir sama dengan radio pada umumnya, hanya saja pada wilayah (*level of playing field*) yang terbatas. Terbatasnya jangkauan media komunitas ini justru diharapkan dapat memberikan layanan secara lebih spesifik dan membuka partisipasi penuh kepada komunitas karena media ini merupakan refleksi kebutuhan komunitasnya, khususnya di kawasan perbatasan. Kondisi ini berbeda dengan media swasta komersial yang selalu menggunakan logika besaran jumlah penduduk dan potensi ekonomi untuk membuka jaringannya. Akibatnya, daerah-daerah yang miskin dan secara ekonomi dinilai tidak menguntungkan, tidak akan mendapatkan layanan media penyiaran swasta.

Selanjutnya, untuk menjawab kebutuhan perbatasan tersebut, tiga prinsip mendasar harus diperhatikan dalam penyelenggaraan radio komunitas yang berorientasi untuk memberdayakan publik di wilayah perbatasan. *Pertama*, radio komunitas berskala terbatas dan mendorong partisipasi

warga perbatasan. Karena tipologinya yang mendorong partisipasi warga masyarakat, maka skala terbatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan. Karena adanya keterbatasan jangkauan yang dimiliki, diharapkan dapat memberi kesempatan pada setiap inisiatif warga komunitas untuk tumbuh dan tampil setara sejak tahap perumusan isi siaran, pengelolaan hingga kepemilikan radio. Kemudian, untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat di perbatasan, radio komunitas tersebut harus membangun partisipasi warga masyarakatnya seluas mungkin. Keterlibatan anggota komunitas dalam perumusan isi siaran mengindikasikan terbangunnya proses yang demokratis. Semakin banyak yang terlibat dengan proses yang tepat maka media tersebut dapat menjadi sarana bagi terciptanya proses partisipasi dalam masyarakat. Media komunitas terbentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi dan mengembangkan komunitasnya dengan berbagai macam latar belakang.

Kedua, radio komunitas menjadi forum terbuka untuk mendiskusikan dan mencari solusi bersama atas berbagai persoalan di perbatasan. Sebagai radio milik komunitas, persoalan-persoalan bersama yang ada di wilayah perbatasan dapat diangkat sehingga semakin banyak warga masyarakat yang *concern* dengan persoalan bersama dan mendorong kesadaran akan pentingnya masalah tersebut diselesaikan. Terkait dengan hal ini, Howley (2005, h. 30) menilai media komunitas memiliki sejumlah peran penting dalam masyarakat antara lain sebagai forum yang diperuntukkan bagi kesenian lokal dan organisasi kebudayaan,

mendukung serta mendorong proses produksi kebudayaan yang sifatnya lokal. Lebih lanjut Howley mengatakan, baik dalam format fisik maupun virtual, organisasi media komunitas merupakan salah satu dari sedikit ruang publik, tempat anggota komunitas dapat berkumpul untuk berdebat tentang isu politik, mengapresiasi warisan budaya lokal, serta berkumpul bersama sebagai suatu komunitas.

Ketiga, infrastruktur radio komunitas berangkat dari potensi dan kemandirian masyarakat perbatasan. Untuk membangun rasa kepemilikan, partisipasi komunitas dalam hal penyediaan peralatan radio disesuaikan dengan kemampuan komunitas, meskipun tidak menutup sumber pembiayaan dari luar komunitas. Jika sumber daya infrastruktur berasal dari luar komunitas, maka perlu pendekatan yang tepat agar tidak menimbulkan permasalahan. Seringkali, peralatan yang didatangkan dan didukung pihak luar menimbulkan masalah saat terjadi kerusakan, yakni keengganan warga masyarakat untuk memperbaikinya. Sebaliknya, dengan pembiayaan yang keluar dari pembiayaan warga secara kolektif, akan mendapat dukungan penuh dari warga masyarakat manakala terjadi kerusakan pada peralatan tersebut. Pada sisi lain, seringkali pengelola terjebak pada keinginan memiliki peralatan yang mutakhir dan canggih sehingga memaksakan diri untuk membeli peralatan tersebut melalui dana sendiri yang pada gilirannya memunculkan konflik "kepemilikan" di antara pengelola tersebut.

Selain hal-hal teknis, perkembangan radio komunitas masih menghadapi

berbagai masalah. Menurut Masduki (2005, h. 154) setidaknya terdapat empat masalah yang membelit radio komunitas di Indonesia: (1) persoalan membentuk institusi dan manajemen radio yang berbasis pada partisipasi komunitas, (2) implementasi regulasi siaran terkait program siaran, perizinan, standar teknologi siaran dan etika siaran, (3) persoalan SDM, dan (4) persoalan dana.

Menurut ketua *Jaringan Radio Komunitas Indonesia* (JRKI) Sinam M Sutarno (Rianto dkk, 2014), JRKI mempunyai dua kendala dalam mengelola *Radio Komunitas* (Rakom). Kendala tersebut dapat dikategorikan sebagai kendala internal dan eksternal. Kendala internal tersebut mencakup tiga hal pokok. *Pertama, resources* (persoalan teknis) terkait dengan pengadaan alat yang bersertifikat. Ketersediaan alat yang kurang terutama bagi rakom di daerah seperti Papua atau Kalimantan yang harus memesan dari luar Jawa; *Kedua*, SDM terbatas terutama yang menguasai teknis (perbaikan dan *maintenance* alat) serta anggota yang bisa dikader; *Ketiga*, pendanaan.

Selain menghadapi kendala internal, ada pula kendala eksternal radio komunitas. *Pertama*, keterbatasan alokasi frekuensi dimana radio komunitas hanya diberi jatah tiga kanal. Itu pun sangat rentan kebocoran dan masuk ke frekuensi penerbangan. Totalnya sekitar 1,3%. Penempatan yang dilakukan oleh pemerintah ini menimbulkan pertanyaan posisi kanal yang berada di bawah untuk semua daerah, padahal di luar Jawa masih banyak kanal kosong. *Kedua*,

keterbatasan daya pancar (50 watt dengan jarak sekitar 2,5 km). Kondisi ini menjadi kendala ketika diterapkan secara sama untuk semua daerah. Di daerah dengan penduduk padat misalnya, daya pancar dengan kekuatan ini tak menjadi masalah. Namun, jika radio komunitas berada di pedalaman Papua dan Kalimantan, faktor jarak tersebut menyebabkan hanya dua atau tiga rumah yang menerimanya. *Ketiga*, larangan iklan komersial. Iklan dalam konteks radio komunitas tentu tidak dapat disamakan dengan iklan radio swasta lainnya. *Keempat*, perizinan. Syarat untuk perijinan cukup sulit, misalnya harus memiliki alat yang bersertifikat. Padahal peralatan bersertifikat tidak murah untuk ukuran semua komunitas. Praktik di lapangan, keluarnya izin juga sangat lama.

Terkait pemberdayaan masyarakat melalui radio komunitas, paling tidak ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yakni kultural dan struktural (Yusuf, 2013, h. 129). Pendekatan kultural dilakukan dengan penguatan langsung kepada masyarakat, misalnya berupa kampanye sosialisasi, pelatihan-pelatihan tentang arti penting radio komunitas yang disampaikan lewat media komunitas menjadi *needs* bukan hanya *wants*. Kebutuhan ini tidak hanya kebutuhan menurut pemahaman pengelola media atau pemrakarsa dari luar. Sebaliknya, ini adalah kebutuhan yang berasal dari bawah yaitu masyarakat perbatasan yang benar-benar membutuhkan ada atau tidaknya, yang menilai penting atau tidaknya keberadaan radio komunitas di lingkungannya.

Pendekatan berikutnya melalui aspek struktural yakni dengan penguatan kelembagaan dan jaringan. Untuk radio komunitas, penguatan struktural dilakukan baik di tingkat pusat maupun daerah melalui advokasi perizinan yang berfokus pada legalitas keberadaan radio komunitas, serta para pengelolanya di tingkat desa.

Mengangkat Informasi Perbatasan: Titik Awal Proses *Centering The Margin*

Selama ini, informasi tentang perbatasan identik dengan persoalan kemiskinan, ketertinggalan, pengikisan nasionalisme, infiltrasi budaya, dan konflik kedaulatan dengan negara tetangga. Padahal jika ditampilkan secara objektif dan mendalam, banyak informasi mengenai perbatasan yang bisa disajikan sehingga daerah-daerah perbatasan yang jauh dari ibukota negara dengan segala potensinya akhirnya bisa tampil, berkembang, bahkan tidak lagi muncul dengan cerita ketertinggalan. Bagi media di wilayah perbatasan, informasi yang disajikan harus membawa mereka berada dalam diskusi bersama dengan warga masyarakat Indonesia lainnya. Temuan Puslitbangdiklat RRI (2014) terkait informasi yang diinginkan masyarakat untuk diangkat RRI ke level nasional sekaligus mendorong kebijakan publik di tingkat lokal adalah: ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, budaya lokal, pendidikan, sosial politik, hukum-kriminal, keamanan, tata guna lahan, pemantauan cuaca, dan peringatan bencana alam. Jika dirinci lebih lanjut kebutuhan terbesar masyarakat perbatasan terkait jenis informasi dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Persoalan ekonomi di daerah perbatasan yang perlu dibawa ke tingkat nasional:
 - a. Perdagangan lintas perbatasan
 - b. Ketersediaan kebutuhan pokok
 - c. Harga kebutuhan pokok
 - d. Peluang pekerjaan
2. Persoalan sosial politik di daerah perbatasan yang perlu dibawa ke tingkat nasional:
 - a. Penyelundupan
 - b. Kemiskinan
 - c. Kerja sama antar negara
 - d. Batas teritorial perbatasan
 - e. Perdagangan manusia
3. Persoalan sumber daya alam dan lingkungan hidup di daerah perbatasan yang perlu dibawa ke tingkat nasional:
 - a. Kerusakan lingkungan
 - b. Kemanfaatan bagi masyarakat setempat
 - c. Konservasi sumber daya alam
 - d. Eksploitasi sumber daya alam oleh asing
 - e. Peringatan dini bencana alam
4. Persoalan infrastruktur di daerah perbatasan yang perlu dibawa ke tingkat nasional:
 - a. Sarana transportasi
 - b. Fasilitas pendidikan
 - c. Fasilitas kesehatan
 - d. Air bersih
 - e. Pasar
 - f. Fasilitas rekreasi

Informasi-informasi tersebut tentunya

harus diramu dalam program siaran radio yang kreatif menarik dengan berbagai format sehingga layak dan memiliki daya tarik untuk didengarkan baik oleh masyarakat perbatasan sendiri maupun masyarakat Indonesia di luar kawasan perbatasan. Program acara khusus informasi tentang dan dari perbatasan tersebut selain berupa berita lempang (*straight news*), misalnya, dapat berbentuk: 1) dialog interaktif dengan narasumber terpilih dalam kemasan acara untuk menjangkau pendengar di kawasan perbatasan, 2) *features*, yaitu penyiaran cerita/ulasan khusus tentang potensi ekonomi dan sosial budaya kawasan perbatasan untuk membangkitkan minat pengembangan potensi kawasan perbatasan, 3) *radio drama*, adalah program sandiwara radio yang bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat, 4) *Public Service Advertisement (PSA)*, adalah jenis iklan non komersil atau iklan layanan masyarakat.

Pada akhirnya, pengelolaan informasi di kawasan perbatasan adalah suatu kerja besar yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh media. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku peran (*stakeholders*) untuk bersama-sama memberi perhatian terhadap upaya pembangunan perbatasan negara. Salah satu pihak yang memiliki peran penting adalah *Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI)*. Maka, kerja sama radio di perbatasan dengan BNPP merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang efektif serta berdaya-ungkit tinggi (*high leverage*). Di sinilah titik awal proses *centering the margin* menemukan relevasinya.

SIMPULAN

Keberadaan radio di wilayah perbatasan memiliki nilai strategis dalam pengelolaan wilayah batas negara maupun kawasan perbatasan. Salah satu hal yang penting dengan pembangunan fisik maupun sosial ekonomi adalah ketersediaan informasi. Informasi menjadi prasyarat sekaligus kekuatan besar jika ingin membangun kawasan perbatasan secara optimal. Di sini, gagasan mengenai *centering the margin* dimunculkan. Harapannya, radio di kawasan perbatasan akan mampu menyuarakan beragam suara dari perbatasan, termasuk persoalan-persoalan di kawasan itu sehingga bisa masuk ke dalam agenda nasional atau setidaknya muncul dalam *discourse* nasional. Kawasan perbatasan seringkali “terabaikan”, padahal kawasan ini merupakan garda terdepan dalam berinteraksi dengan negara tetangga.

Mengoptimalkan fungsi dan peran RRI serta radio komunitas dalam membangun kawasan perbatasan bukan persoalan yang sederhana mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi. Meski memiliki potensi besar, radio di perbatasan masih harus menghadapi berbagai permasalahan umum, diantaranya persoalan kelembagaan, sarana dan prasarana, program, sumberdaya manusia, dan keuangan.

Namun, jika melihat tingginya potensi yang dimiliki RRI dan radio komunitas, kontribusi keduanya dalam pembangunan kawasan perbatasan sangat besar karena dalam pengelolaan wilayah batas negara maupun kawasan perbatasan, salah satu prioritas yang tak kalah penting dengan pembangunan fisik dan sosial ekonomi adalah ketersediaan informasi. Informasi menjadi

prasyarat sekaligus kekuatan besar jika ingin membangun kawasan perbatasan secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Darmanto, dkk. (2012). *Pengembangan program dan program siaran RRI perbatasan (studi di Sabang, Batam, Entikong, dan Atambua)*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit Komunikasi UII.
- Howley, K. (2005). *Community media: People, places, and communication technologies*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Masduki. (2005). Perkembangan dan problematika radio komunitas di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157.
- Masduki &Yusuf, I.A, (eds.). (2011). *Potret studi produksi*. Jakarta, Indonesia: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Mengibarkan merah putih di pulau kecil terluar. (2014, Agustus 25-31). *Majalah Tempo*, h. 90-91.
- Puslitbangdiklat RRI. (2014). *Peran LPP RRI dalam mengonstruksi identitas nasional Indonesia di wilayah perbatasan*. Laporan Penelitian. Kerja sama Puslitbangdiklat RRI Jakarta dengan Pusat Kajian Media dan Budaya Populer, Yogyakarta, Indonesia.
- Rianto, P, dkk. (2012). *Dominasi TV swasta (nasional): Tergerusnya keberagaman isi dan kepemilikan*. Yogyakarta, Indonesia: PR2MEDIA-Yayasan TIFA.
- (2014). *Kepemilikan dan intervensi siaran: Bahaya media di tangan segelintir orang bagi demokrasi*. Yogyakarta, Indonesia: PR2MEDIA-Yayasan TIFA.
- Yusuf, I. (2013). TIK, Media komunitas, dan pemberdayaan komunitas: Berangkat dari dinamika lapangan. *Jurnal Mandatory*, 10(2), 115-145.